

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan merupakan sebuah masalah yang menyelimuti sebagian besar wilayah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa ketimpangan ini tidak akan pernah terselesaikan, karena semakin maju sebuah daerah maka terdapat ketimpangan yang sangat jelas antara kelompok tingkat pendapatan tinggi dengan kelompok tingkat pendapatan rendah, antar kelompok disebuah lapangan kerja yang bagus seperti pekantoran dengan kelompok dilapangan kerja yang biasa saja seperti buruh, dan pendapatan perkapita antar daerah yang sangat maju dengan daerah yang terbelakang. Dimana pendapatan perkapita suatu daerah diukur menggunakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Ketimpangan yang paling sering kita dengar yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi. Ketimpangan didalam pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif yang dapat kita lihat dengan sangat jelas. Dengan ketimpangan yang terjadi antar wilayah menyebabkan daerah terbelakang berusaha untuk lebih maju dan meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak ketinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu maju.

Menurut Pangkiro, Rotinsulu dan Wauran (2016), gambaran secara menyeluruh untuk melihat kinerja dan seberapa efektif kondisi perekonomian suatu negara dilakukan dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Memang disadari bahwa tingginya angka PDB

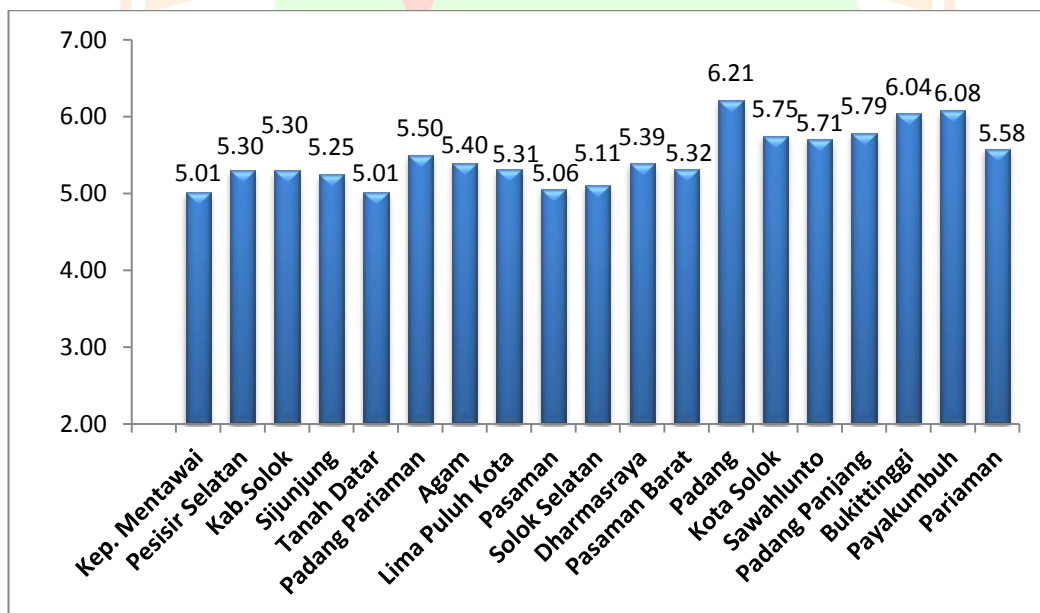
belum tentu akan mencerminkan meratanya distribusi pendapatan. Kenyataannya bahwa pendapatan masyarakat di suatu negara tidak selalu merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, maka semakin besar pula disparitas yang akan terjadi.

Selanjutnya produk domestik bruto, digunakan sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu perekonomian. jika kita melihat kondisi perekonomian Indonesia yang secara makro menunjukkan performa yang baik, namun di sisi lain terdapat suatu realitas ketimpangan dan kemiskinan yang masih menyelimuti sebagian rakyat Indonesia (Pangkiro, Rotinsulu, & Wauran, 2016). Salah satu penyebab dari kemiskinan yaitu banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja/menganggur maupun yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan skill yang dimilikinya.

Pengangguran ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan disuatu wilayah, karena dapat dilihat bahwa negara maju memiliki tingkat pengangguran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah berkembang maupun daerah terbelakang. Pengangguran juga merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pengangguran terdidik daripada pengangguran yang tidak terdidik. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang sesuai bagi para calon pencari kerja tamatan perguruan tinggi, sedangkan bagi mereka yang tidak menamatkan perguruan tinggi berani melakukan pekerjaan apapun asalkan mendapatkan upah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Secara umum iklim di Sumatera Barat bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, sehingga pertanianlah yang menjadi sektor yang mendominasi pekerjaan masyarakat di wilayah ini. Kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Barat melambat selama beberapa tahun belakangan ini. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 5,26 persen, sedangkan pada tahun 2006 laju pertumbuhan Sumatera Barat mencapai 6,14 persen (Lampiran 4.A).

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Persen)

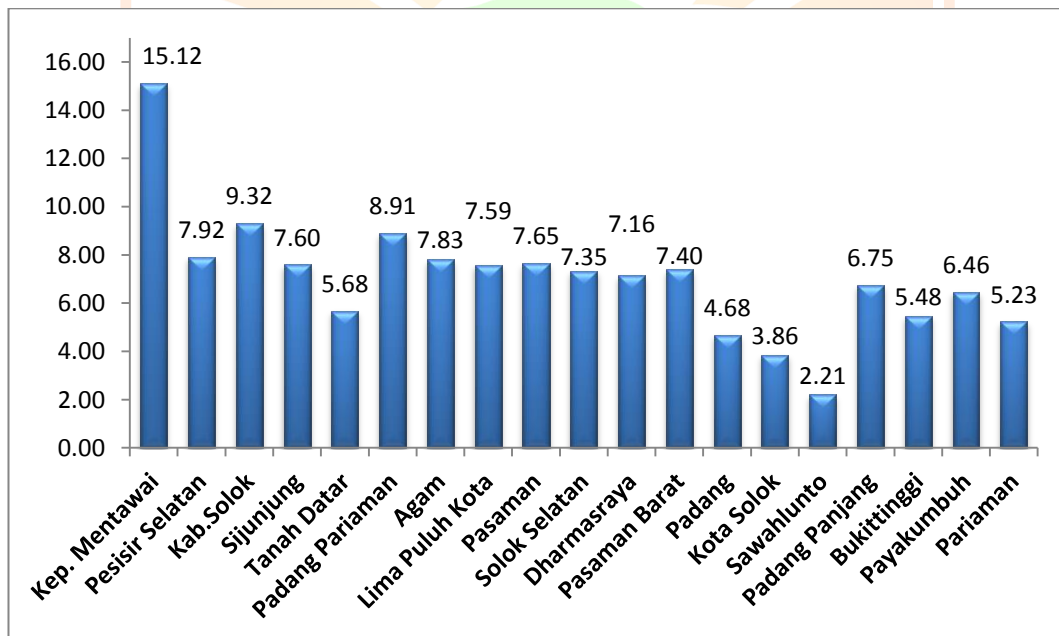


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

Melambatnya kinerja perekonomian ini disebabkan oleh produksi sektor pertanian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang menurun dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai oleh Sumatera Barat yaitu pada tahun 2008

sebesar 6,88 persen (Lampiran 4.A). Sementara laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 untuk kabupaten/kota tertinggi dimiliki oleh Kota Padang sebesar 6,21 persen, dan pertumbuhan perekonomian per kabupaten/kota terendah untuk tahun 2016 sama-sama dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,01 persen (Grafik 1.1).

Grafik 1.2
Tingkat Kemiskinan Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Persen)

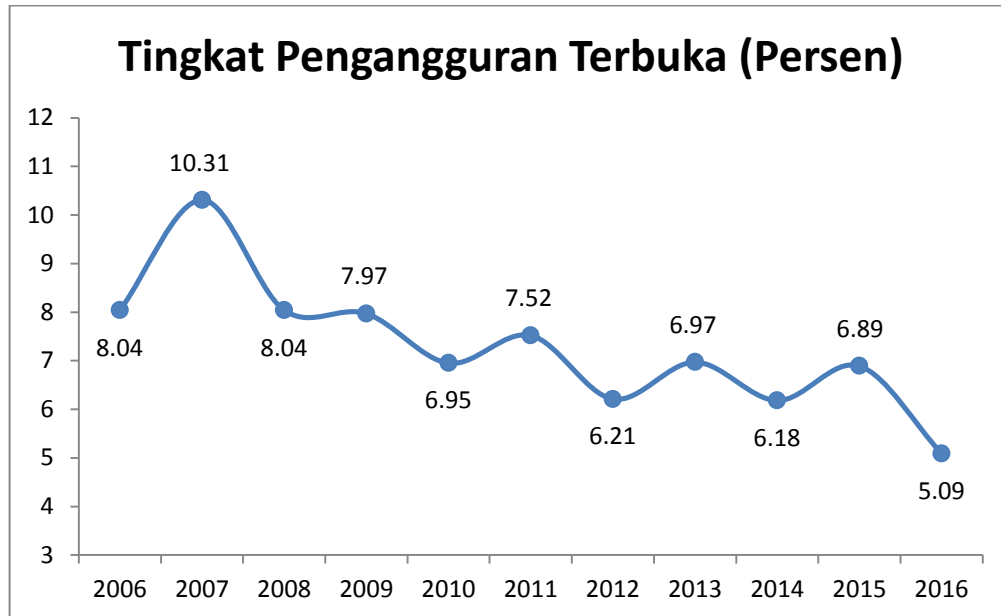


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

Sementara persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2006 hingga 2014 mengalami penurunan yang sangat baik dari 12,51 persen menjadi 6,89 persen. Akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen, dan pada tahun 2016 berkurang kembali sebesar 7,09 persen (Lampiran 4.B). Sedangkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan untuk kabupaten/kota terendah dimiliki oleh Kota Sawahlunto sebesar 2,21 persen, dan

tingkat kemiskinan per kabupaten/kota tertinggi untuk tahun 2016 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 17,57 persen (Grafik 1.2).

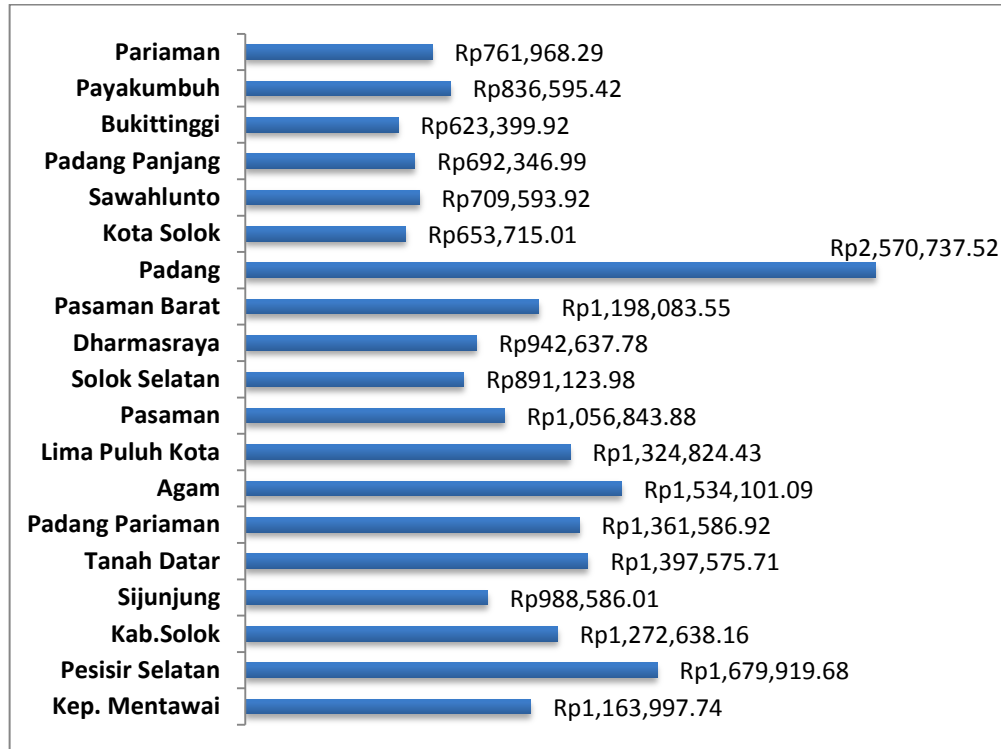
Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2006-2016 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

Untuk ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kondisi meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 TPT Sumatera Barat mencapai 5,09 persen, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 8,04 persen (Grafik 1.3). Ini sungguh angka yang sangat memuaskan yang telah dicapai oleh Sumatera Barat dalam hal peningkatan ketenagakerjaannya.

Grafik 1.4
Pengeluaran Pemerintah Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah

Selanjutnya untuk pengeluaran pemerintah (*Govertment Expenditure*) per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2006 hingga 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah per kabupaten/kota tertinggi dimiliki oleh Kota Padang sebesar 2.570.737,52 juta rupiah diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1.679.919,68 juta rupiah, dan Kabupaten Agam sebesar 1.534.101,09 juta rupiah. Sementara pengeluaran pemerintah per kabupaten/kota terendah untuk tahun 2016 dimiliki oleh Kota Bukittinggi sebesar 623.399,92 juta rupiah (Grafik 1.4). Pengeluaran pemerintah yang dimaksud disini adalah seluruh pengeluaran pemerintah baik pengeluaran langsung maupun pengeluaran tidak langsung.

Penelitian ini didasarkan kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangkiro, dkk (2016) yang menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka disparitas ekonomi. Tingkat kemiskinan yang meningkat akan memperbesar angka disparitas ekonomi. Dan ini menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan sektor penyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauliddiyah (2014) yang menemukan bahwa kenaikan didalam pertumbuhan ekonomi disertai dengan naiknya ketimpangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2003) yang menemukan bahwa memang adanya korelasi negatif antara indeks Williamson dengan pertumbuhan PDRB. Sedangkan Ginting (2015) menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya penelitian oleh Dhyatmika, dan Atmanti (2013) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, sedangkan variabel tingkat pengangguran (UE) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini akan dipusatkan pada:

1. Bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Kebijakan apa yang diperlukan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengkaji/menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
3. Merumuskan kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fundamental ekonomi makro, khususnya ketimpangan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara praktis, menjadi masukan bagi pemerintah daerah Sumatera Barat dalam perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan di dalam pembangunan ekonomi itu sendiri.
3. Secara teoritis, dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi, sekaligus dapat dijadikan acuan/referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang dianalisis melalui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Agar penelitian ini lebih terarah, maka cakupan dalam penelitian ini perlu dibatasi. Batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota.
2. Waktu dalam penelitian ini adalah selama tahun 2006 hingga 2016.
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel dependennya adalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang diolah menggunakan *Indeks Williamson*.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, dimana setiap bagian akan menjelaskan berbagai topik atau permasalahan yang terkait dengan judul penelitian. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisikan tinjauan teoritis, menyajikan penelitian terdahulu yang akan menjadi literatur penelitian ini, kemudian menjelaskan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian, tujuan dan objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode analisis data, uji asumsi klasik dan pengujian statistik.

BAB IV Gambaran Umum

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian berupa gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, ketimpangan pembangunan ekonomi, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan tingkat pengangguran terbuka, dan perkembangan pengeluaran pemerintah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil temuan penelitian, pembahasan dan implikasi kebijakan.

BAB VI Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil-hasil penelitian yang ditemukan pada pembahasan dan kemudian merumuskan saran bagi pihak-pihak yang terkait, serta menguraikan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian.

